



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAMSUDIN
2. Jabatan : AUDITOR UTAMA
3. NHK : 86480

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.595.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 65 m2/21 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/100 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m2/175 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah Seluas 140 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA TEGAL , HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 550.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 270 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
9. Tanah Seluas 245 m2 di KAB / KOTA KOTA TEGAL , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 153.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000



2. MOBIL, HONDA FREED GB3 1.5 S AT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT D1B02N12L2A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 212.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 88.956.186

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.049.456.186

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.049.456.186

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.